

## BAB VI

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Vicky Randal dan Lars Svasand berusaha melihat pelebagaan partai politik dari empat dimensi, yaitu dimensi kesisteman, dimensi identitas nilai, dimensi otonomi pengambilan keputusan, dan dimensi citra publik. Melihat dari keseluruhannya pelebagaan PDI Perjuangan di Sumatera Barat periode 2019-2022 ini, memiliki baik kelebihan maupun kekurangan dalam setiap dimensi pelebagaan politik partai. Dari penjelasan yang telah peneliti jelaskan melalui data sekunder dan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik PDI Perjuangan belum terlebaga dengan baik, jika dilihat dari empat aspek yang dikemukakan oleh Randal dan Lars dalam melihat pelebagaan politik suatu partai.

Pertama, dimensi kesisteman. Pada dimensi ini Randal dan Lars lebih berfokus pada pengelolaan internal partai, yang mana melihat dari aspek asal-usul partai, bagaimana proses rekrutmen dalam partai, pelaksanaan tujuan dan fungsi partai, hingga cara partai dalam mempertahankan hubungan dengan anggota maupun simpatisan. Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa pelebagaan politik PDI Perjuangan di Sumatera Barat berada di tingkat sedang, peneliti melihat bahwa elektabilitas PDI Perjuangan di Sumatera Barat masih dipengaruhi oleh asal-usul serta cara partai dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya baik

ditingkat pusat maupun daerah. Tujuan partai politik PDI Perjuangan yang akan memperjuangkan hak rakyat, nyatanya tidak berjalan baik di Sumatera Barat, sehingga masyarakat Sumatera Barat tidak merasa terwakilkan oleh partai ini. Oleh karenanya peneliti menyimpulkan bahwa PDI Perjuangan belum mampu beradaptasi dan memahami keinginan masyarakat Sumatera Barat. Namun disisi lain, cara partai dalam menjalin serta mempertahankan hubungan dengan anggota dan simpatisan sudah berjalan dengan baik. PDI Perjuangan selalu menjaga komunikasi antara satu dengan yang lainnya, sebagai contoh yang dapat dilihat adalah pelaksanaan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang telah terjadwalkan dengan baik dan tertulis dalam AD/ART PDI Perjuangan.

Kedua, dimensi identitas nilai, yang melihat pada bagaimana basis sosial pendukung yang dimiliki oleh suatu partai politik. Meski perolehan suara yang diperoleh PDI Perjuangan di Sumatera Barat terbilang rendah dari pemilu ke pemilu, namun partai ini memiliki pendukung yang loyal di beberapa daerah di Sumatera Barat. Randal dan Lars menyatakan bahwa suatu partai politik dapat dikatakan terlembaga dengan baik, apabila suatu partai politik telah memiliki basis sosial pendukung yang jelas. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pelembagaan politik PDI Perjuangan di Sumatera Barat di lihat dari identitas nilai sudah baik.

Ketiga, dimensi otonomi pengambilan keputusan, berfokus pada bagaimana sumber pendanaan suatu partai politik, hubungan partai dengan aktor-aktor diluar partai serta melihat hubungan partai dengan pemegang otoritas tertinggi dalam partai. Peneliti menilai PDI Perjuangan di Sumatera Barat memiliki masalah pada keuangan partai, partai ini hanya mengandalkan uang

yang berasal dari iuran anggota yang dibayarkan secara sukarela, serta partai sangat mengharapkan bantuan dari luar partai mengingat kebutuhan dana untuk pemilu sangat banyak. Masalah ini akan berimplikasi pada proses pengambilan keputusan partai, yang mana si pemberi sumbangan tentunya akan mengharapkan adanya imbalan atas perbuatannya, entah itu sekedar berupa perlakuan istimewa atau bahkan adalah bentuk pembelian pengaruh pada partai. selanjutnya otonomi pengambilan keputusan melihat pada bagaimana hubungan partai dengan pemegang otoritas tertinggi dalam partai, PDI Perjuangan Sumatera Barat masih terpusat pada keputusan yang dikeluarkan oleh ketua umum, dimana PDI Perjuangan tingkat daerah ini tidak memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan untuk jalannya partai di daerah mereka sendiri. Artinya PDI Perjuangan di Sumatera Barat belum memiliki hak berupa desentralisasi kekuasaan dari pusat untuk menentukan nasib mereka sendiri, melainkan masih terpaku pada keputusan ketua umum atau pengurus di tingkat pusat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelembagaan politik PDI Perjuangan dilihat dari otonomi pengambilan keputusan masih berada di tingkatan sedang.

Keempat, dimensi citra publik, yang melihat pada bagaimana partai mampu membangun citra yang baik di tengah masyarakat, juga cara partai dalam menanamkan imajinasi partai, serta bagaiman cara partai dalam menarik simpati masyarakat. PDI Perjuangan di Sumatera Barat memiliki citra yang kurang baik, hal ini diungkapkan oleh setiap informan yang peneliti wawancara bahwasanya PDI Perjuangan mendapatkan pelabelan sebagai PKI, partai kristen dan lainnya. Dilain sisi, sikap arogan pemimpin maupun kader PDI Perjuangan di tingkat pusat seringkali dinilai tidak sesuai dengan kultur dan keinginan masyarakat Sumatera

Barat. Peneliti berpandangan bahwa, hal ini disebabkan oleh pelembagaan partai PDI Perjuangan pada dimensi citra publik ini belum berjalan dengan baik, berdasarkan pada pernyataan Randal dan Lars, bahwa partai politik akan dapat dikatakan telah terlembaga dengan baik, apabila partai tersebut telah tertanam dalam imajinasi masyarakat dengan baik. Oleh sebabnya, peneliti menilai bahwa pelembagaan politik PDI Perjuangan di Sumatera Barat berdasarkan dimensi citra publik masih rendah, karena belum mampu beradaptasi dengan kultur masyarakat Sumatera Barat, sehingga hal-hal yang mampu menarik simpati masyarakat Sumatera Barat belum dapat dipahami oleh partai ini.

Berdasarkan empat aspek yang digunakan oleh Randal dan Lars dalam melihat pelembagaan politik suatu partai, peneliti menilai bahwa PDI Perjuangan Sumatera Barat belum terlembaga dengan baik. Kemampuan partai ini dalam melembagakan diri baik dari aspek otonomi pengambilan keputusan maupun dari aspek citra publik masih jauh dari kata baik, ini dapat dilihat dari keputusan yang dihasilkan dalam partai masih berpusat pada ketua umum atau pengurus di tingkat pusat. Sedangkan dari aspek citra publik, PDI Perjuangan di Sumatera Barat selalu mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat Sumatera Barat yang timbul karena tindakan dari partai dan kader partai itu sendiri, sehingga PDI Perjuangan di Sumatera Barat selalu berada di urutan yang rendah dalam perolehan suara pelaksanaan pemilu.

## 1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jabarkan serta merujuk pada penelitian mengenai permasalahan pelebagaan politik partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Sumatera Barat periode 2019-2022, maka peneliti memiliki saran teoritik maupun saran praktis sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada teori pelebagaan politik partai yang dikembangkan oleh Vicky Randal dan Lars Svasand, yang peneliti gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini mengenai permasalahan pada pelebagaan politik suatu partai, maka dapat dilihat bahwa pelebagaan politik yang baik akan sangat berpengaruh pada perolehan suara dalam pelaksanaan pemilu, agar partai politik dapat selalu mengikuti pola perubahan pada keinginan masyarakat. Maka peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan masyarakat Sumatera Barat terhadap pelebagaan politik PDI Perjuangan yang berjalan di Sumatera Barat, terkhusus melihat pada basis sosial pendukung PDI Perjuangan yang berada di Dhamasraya, Mentawai, Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan.
2. Saran untuk partai politik adalah sangat pentingnya untuk memiliki pelebagaan politik yang baik, karena pelebagaan politik akan mengatur bagaimana jalannya suatu organisasi politik. Terkhususnya pada partai politik PDI Perjuangan untuk mengatur jalannya desentralisasi kekuasaan dalam partai, hingga peningkatan kemampuan partai dalam menciptakan citra publik yang baik, baik

itu berhubungan dengan sikap pemimpin dan kader maupun yang berasal dari partai itu sendiri sangat penting untuk diperhatikan. Sebab, ini akan berpengaruh pada keteguhan partai dalam menjalankan organisasinya dan kemampuan partai bertahan dari pemilu ke pemilu.

